



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA RELIGI MASJID RAYA BAITURRAHMAN DI KOTA BANDA ACEH

Dirma Wardatul Rizki¹⁾, M. Rafi²⁾, Afrijal³⁾

Universitas Syiah Kuala

¹⁾ dirmarizkii@gmail.com, ²⁾ rafi45030@gmail.com, ³⁾ afrijal@usk.ac.id

Histori artikel

Received:
4 June 2026

Accepted:
19 June 2026

Published:
21 June 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, pelaku usaha pariwisata, pengunjung, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengembangan wisata religi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dalam menjaga fungsi religius dan nilai historis Masjid Raya Baiturrahman. Faktor pendukung kolaborasi meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan sinergi antar lembaga. Adapun hambatan yang ditemukan tidak berupa konflik terbuka, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya regulasi formal dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ibadah, pelestarian nilai budaya, dan pengembangan wisata religi secara berkelanjutan di Masjid Raya Baiturrahman.

Kata-kata Kunci: collaborative governance, wisata religi, Masjid Raya Baiturrahman, partisipasi masyarakat, tata kelola pariwisata.

*Penulis koresponding : Dirma Wardatul Rizki (dirmarizkii@gmail.com)

Abstract. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the development of religious tourism at the Baiturrahman Grand Mosque in Banda Aceh. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. The informants consisted of representatives from the Aceh Culture and Tourism Office, the Management Unit of the Baiturrahman Grand Mosque, tourism business actors, visitors, and other stakeholders involved in the development of religious tourism. The data were analyzed using thematic analysis techniques. The findings reveal that the implementation of collaborative governance is reflected in effective communication and coordination among stakeholders, clear role distribution, and a shared commitment to preserving the religious function and historical value of the Baiturrahman Grand Mosque. Supporting factors include active community participation, government support, and institutional synergy. Meanwhile, the challenges identified are not related to open conflicts but rather to the absence of more formalized regulations and the need for more sustainable institutional coordination. The study concludes that collaborative governance plays a significant role in maintaining a balance between religious functions, cultural preservation, and the sustainable development of religious tourism at the Baiturrahman Grand Mosque.

Keywords: collaborative governance, religious tourism, Baiturrahman Grand Mosque, community participation, tourism governance.

Latar Belakang

Pariwisata religi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus pelestarian nilai budaya dan keagamaan masyarakat. Wisata religi tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga menjadi media edukasi, refleksi spiritual, serta penguatan identitas budaya lokal. Di Indonesia, berbagai destinasi wisata religi berkembang menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberhasilan pengembangan wisata religi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi utama destinasi tersebut (Ningsih & Yuza, 2025).

Salah satu destinasi wisata religi yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi adalah Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah bagi masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi simbol identitas keislaman, warisan sejarah, dan ikon pariwisata daerah. Setelah proses rehabilitasi pascatsunami tahun 2004, Masjid Raya Baiturrahman mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah maupun luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata religi yang berdaya saing sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kesakralannya.

Pengembangan wisata religi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Kompleksitas pengelolaan destinasi wisata menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang

banyak digunakan dalam pengelolaan sektor publik dan pengembangan pariwisata adalah *collaborative governance*.

Collaborative governance merupakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama dalam mencapai tujuan publik. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan dialog, partisipasi, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pencapaian konsensus dalam penyelesaian masalah publik (Erwin, 2022). Pendekatan ini menjadi relevan dalam pengembangan wisata religi karena keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kontribusi berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata (Muallim et al., 2024).

Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan wisata religi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan nilai budaya dan keagamaan yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, pelayanan wisata, serta pelestarian tradisi lokal dapat memperkuat daya saing destinasi wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar (Akbar et al., 2022).

Selain partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, sarana pendukung, serta ruang koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui kebijakan yang inklusif dan responsif, pemerintah dapat mendorong terciptanya sinergi antara pengelola destinasi, masyarakat, dan pelaku usaha sehingga pengembangan wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan (Muallim et al., 2024).

Dalam konteks Masjid Raya Baiturrahman, pengembangan wisata religi menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan destinasi wisata lainnya. Sebagai tempat ibadah yang aktif digunakan masyarakat, pengelolaan wisata harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi religius, nilai historis, dan aktivitas pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pola kolaborasi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengurangi kesakralan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata, seperti desa wisata, wisata budaya, dan wisata berbasis masyarakat. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada destinasi wisata umum,

sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana proses kolaborasi dijalankan pada destinasi yang memiliki fungsi ganda sebagai tempat ibadah dan objek wisata religi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh, termasuk bentuk kolaborasi yang terjalin antar pemangku kepentingan, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh, khususnya terkait bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangannya.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang merupakan salah satu destinasi wisata religi unggulan di Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada posisi strategis Masjid Raya Baiturrahman sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus destinasi wisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaannya.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, pelaku usaha pariwisata, pengunjung wisata religi, petugas pengelola masjid, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembagian peran, pola komunikasi, faktor pendukung, serta hambatan dalam pengembangan wisata religi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, foto, dan berbagai informasi yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang ditemukan selama penelitian.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data yang berbeda untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi dan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan

Penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh ditunjukkan melalui terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, pengelola masjid, pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat. Komunikasi menjadi elemen penting dalam membangun kesepahaman mengenai tujuan pengembangan wisata religi sekaligus menjaga fungsi utama Masjid Raya Baiturrahman sebagai pusat ibadah umat Islam. Melalui komunikasi yang efektif, setiap pihak dapat menyampaikan kebutuhan, kendala, serta usulan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata religi sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ismail, S.Pd. menjelaskan bahwa penerapan kolaborasi memberikan dampak positif terhadap tata kelola wisata religi karena setiap pihak dapat berkomunikasi secara langsung dalam membahas berbagai persoalan yang muncul selama proses pengelolaan.

“Positif, karena kerja sama dan kolaboratif kita bisa meningkatkan governance jadi kita bisa tau apa yang boleh dan apa yang gak boleh dan apa kendala kita bisa dapat langsung untuk mencari solusi bersama-sama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun antar pemangku kepentingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun pemahaman bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Setiap aktor memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan

kepentingannya sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif. Situasi ini mencerminkan prinsip dasar *collaborative governance* yang menempatkan dialog dan keterlibatan aktor sebagai fondasi utama dalam penyelesaian persoalan publik.

Komunikasi yang terjalin juga berperan dalam memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks pengembangan wisata religi, kejelasan peran menjadi penting karena Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai tempat ibadah yang memiliki nilai religius dan historis yang tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas wisata harus mempertimbangkan aspek kenyamanan jamaah, pelestarian nilai budaya, serta kebutuhan wisatawan. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, berbagai kepentingan tersebut dapat diselaraskan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berpotensi menghambat pengembangan wisata religi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung antar pemangku kepentingan mampu menciptakan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan berbagai program wisata religi. Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti perencanaan kegiatan keagamaan, pengaturan kunjungan wisatawan, penyediaan fasilitas pendukung, hingga promosi destinasi wisata religi. Adanya koordinasi tersebut memungkinkan setiap aktor menjalankan perannya secara lebih terarah dan terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan wisata religi tidak berjalan secara parsial, tetapi dilaksanakan melalui kerja sama yang saling mendukung antar lembaga dan kelompok masyarakat yang terlibat.

Dalam perspektif *collaborative governance*, komunikasi merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *face-to-face dialogue* menjadi unsur penting dalam membangun hubungan kerja sama yang produktif. Dialog yang dilakukan secara langsung memungkinkan para aktor untuk memahami perspektif masing-masing, mengurangi kesalahpahaman, serta membangun komitmen terhadap tujuan bersama. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman telah mendorong terciptanya pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi religius masjid.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Priono dan Rusli (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor utama dalam keberhasilan *collaborative governance* pada pengembangan destinasi wisata. Melalui komunikasi yang terbuka, para pemangku kepentingan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis serta meningkatkan kualitas koordinasi dalam pelaksanaan program-program wisata. Penelitian Ismail, Wahyudi, dan Puspaningtyas (2023) juga menegaskan bahwa komunikasi yang berkelanjutan mampu memperkuat partisipasi aktor dalam pembangunan destinasi wisata

karena setiap pihak merasa memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, komunikasi yang intensif turut berkontribusi dalam membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat penting dalam *collaborative governance* karena memungkinkan setiap pihak bekerja sama tanpa adanya rasa curiga atau dominasi kepentingan tertentu. Ketika komunikasi berlangsung secara terbuka dan transparan, para aktor akan lebih mudah memahami tujuan bersama yang ingin dicapai sehingga kolaborasi dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan fondasi utama dalam penerapan *collaborative governance* pada pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman. Komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan telah memungkinkan terbangunnya kesepahaman antar pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi program, serta mendukung terciptanya tata kelola wisata religi yang lebih efektif. Kondisi ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan Masjid Raya Baiturrahman sebagai destinasi wisata religi unggulan di Kota Banda Aceh.

Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengembangan Wisata Religi

Salah satu indikator penting dalam penerapan *collaborative governance* adalah adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan. Pembagian peran tersebut diperlukan agar setiap aktor dapat menjalankan fungsi sesuai kapasitas, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga pengelola masjid, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, serta berbagai lembaga pendukung lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan wisata religi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Mukhtar, S.Ag. menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Untuk pengelola mesjid, penanggung jawab untuk manajemen mesjid, baik dari sisi sarana dan prasarana, dari sisi kebersihan dan fasilitas. Untuk pelaku usaha sendiri, mereka yang membawa kami, mereka yang menjual paket tur, sedangkan di Dinas Pariwisata Aceh hanya mengkolaborasikan seperti kegiatan Ramadan kita kerjakan di Masjid Raya Baiturrahman dan kita komunikasikan kepada mereka."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman tidak dilakukan secara terpusat oleh satu lembaga, melainkan melalui pembagian peran yang terstruktur. Pengelola masjid bertanggung jawab terhadap

pengelolaan internal kawasan masjid, termasuk pemeliharaan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan jamaah dan wisatawan. Sementara itu, pelaku usaha pariwisata berperan dalam mempromosikan destinasi melalui penyediaan paket wisata dan layanan pendukung lainnya. Di sisi lain, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak agar dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan yang sama.

Peran pemerintah dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai penggerak utama kolaborasi. Pemerintah tidak hanya bertugas menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktor dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan wisata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berperan aktif dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, termasuk penyelenggaraan program keagamaan pada bulan Ramadan dan kegiatan promosi wisata religi. Peran fasilitatif tersebut menjadi penting karena memungkinkan terbangunnya hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, pengelola masjid, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain pemerintah, pengelola Masjid Raya Baiturrahman memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan fungsi religius dan pelayanan wisata. Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan masjid, pengelola memiliki kewenangan dalam mengatur penggunaan fasilitas, menjaga kebersihan lingkungan, memastikan kenyamanan jamaah, serta mengawasi aktivitas wisata agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Peran ini menjadi sangat penting karena Masjid Raya Baiturrahman bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap kegiatan wisata harus tetap berada dalam koridor yang menghormati kesakralan tempat ibadah.

Keterlibatan pelaku usaha pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan wisata religi. Pelaku usaha berperan dalam memperkenalkan Masjid Raya Baiturrahman kepada wisatawan melalui berbagai paket perjalanan yang ditawarkan. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara destinasi wisata dengan pasar wisatawan yang lebih luas. Keberadaan pelaku usaha membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Masjid Raya Baiturrahman sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kontribusi nyata dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Peran masyarakat lokal tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan wisata religi. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ismail, masyarakat sekitar

turut terlibat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan masjid. Selain itu, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penyediaan berbagai layanan yang dibutuhkan wisatawan, seperti kuliner, penginapan, transportasi, dan penjualan cendera mata. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Kondisi ini mencerminkan prinsip pembangunan pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kemampuan setiap aktor dalam memahami dan menjalankan perannya secara konsisten. Kejelasan pembagian tugas memungkinkan setiap pihak bekerja sesuai dengan kompetensinya tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan. Situasi ini menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas masing-masing aktor. Dalam konteks *collaborative governance*, pembagian peran yang jelas merupakan salah satu prasyarat penting untuk menciptakan kerja sama yang efektif karena setiap pihak memahami kontribusi yang harus diberikan untuk mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Purwanti (2016) dalam Kanaya Avitadira dan Indrawati (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara proporsional. Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan bersama. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Akbar, Supriyono, dan Domai (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Gubugklakah didukung oleh pembagian peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam perspektif *collaborative governance*, pembagian peran yang efektif tidak hanya berkaitan dengan distribusi tugas, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hubungan kerja sama yang terbangun di Masjid Raya Baiturrahman tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat hierarkis, melainkan sebagai kemitraan yang saling mendukung berdasarkan tujuan yang sama. Setiap aktor berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing untuk menjaga keseimbangan antara fungsi ibadah, pelestarian nilai budaya, dan pengembangan wisata religi.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman telah berjalan secara relatif baik. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator, pengelola masjid bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan dan fasilitas, pelaku usaha mendukung promosi dan pelayanan wisata, sedangkan masyarakat berkontribusi dalam menjaga

lingkungan serta mendukung aktivitas ekonomi wisata. Sinergi antar peran tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi di Kota Banda Aceh.

Komitmen dan Kepercayaan dalam Kolaborasi

Komitmen dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan *collaborative governance*. Dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman, kedua aspek tersebut terlihat dari hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengelola masjid, pelaku usaha, dan masyarakat. Kepercayaan yang terbangun memungkinkan setiap pihak menjalankan perannya secara optimal demi mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Mukhtar, S.Ag. menyatakan bahwa pengembangan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman berjalan relatif lancar tanpa kendala yang berarti. Kondisi tersebut didukung oleh kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, tingginya kesadaran sosial dan religius masyarakat, serta dukungan pemerintah yang konsisten.

“Tidak ada kendala dalam pengembangan tempat wisata ini, pengembangan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman berjalan relatif lancar tanpa kendala berarti yang menghambat prosesnya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, seperti kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, tingginya kesadaran sosial dan religius masyarakat, serta dukungan pemerintah yang konsisten.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan mengembangkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai destinasi wisata religi. Kesamaan tujuan tersebut memperkuat kerja sama dan meminimalkan potensi konflik dalam proses pengelolaan. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat terhadap nilai religius masjid turut mendukung terciptanya lingkungan kolaboratif yang kondusif.

Menurut Ansell dan Gash (2008), kepercayaan (*trust building*) dan komitmen terhadap proses (*commitment to process*) merupakan unsur penting dalam *collaborative governance*. Kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi dan pengalaman kerja sama yang positif akan mendorong para aktor untuk terlibat secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan komitmen yang dimiliki para pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, komitmen dan kepercayaan yang terbangun antar pemangku kepentingan telah menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan *collaborative governance*. Kondisi ini memungkinkan proses pengembangan wisata religi berlangsung secara lebih

efektif, menjaga fungsi religius masjid, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata religi di masa mendatang.

Dukungan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Religi

Keberhasilan pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman tidak terlepas dari dukungan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Dukungan tersebut berasal dari pemerintah daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Syariat Islam, Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, masyarakat, serta pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi memerlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ismail, S.Pd. menjelaskan bahwa Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu ikon wisata religi di Aceh yang memiliki kondisi sangat baik dan potensi besar untuk terus dikembangkan.

"Masjid Raya Baiturrahman itu merupakan salah satu ikon wisata religi di Provinsi Aceh, khususnya di Banda Aceh. Sekarang ini, kondisi Masjid Raya Baiturrahman itu sangat terawat, bersih, dan juga sudah menjadi salah satu destinasi unggulan yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata religi tidak hanya didukung oleh nilai historis dan religius yang dimiliki masjid, tetapi juga oleh komitmen berbagai lembaga dalam menjaga kualitas pengelolaan kawasan. Dukungan kelembagaan terlihat dari penyediaan fasilitas pendukung, pemeliharaan infrastruktur, pengaturan aktivitas wisata, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Peran kelembagaan juga terlihat dalam proses pengembangan Masjid Raya Baiturrahman pascatsunami tahun 2004. Hasil wawancara dengan Bapak Setiawan menunjukkan bahwa rehabilitasi dan penataan kawasan masjid menjadi titik awal pengembangan wisata religi secara lebih terstruktur. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sejak saat itu, Masjid Raya Baiturrahman semakin dikenal sebagai destinasi wisata religi yang memiliki nilai sejarah, edukasi, dan spiritual yang tinggi.

Selain dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha turut memperkuat keberlanjutan pengembangan wisata religi. Sinergi antar lembaga memungkinkan berbagai program dapat dilaksanakan secara lebih efektif karena setiap pihak memberikan kontribusi sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Eppel dalam Sudarmo (2015) yang menjelaskan bahwa

collaborative governance merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor pemerintah maupun nonpemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, dukungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman. Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, pengelola masjid, masyarakat, dan sektor swasta telah menciptakan sistem pengelolaan yang mampu menjaga fungsi religius masjid sekaligus mendukung pengembangannya sebagai destinasi wisata religi unggulan di Kota Banda Aceh.

Dampak *Collaborative Governance* terhadap Pengembangan Wisata Religi

Penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman memberikan berbagai dampak positif, baik bagi pengelolaan destinasi wisata maupun bagi masyarakat sekitar. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, pengelola masjid, pelaku usaha, dan masyarakat telah mendorong terciptanya lingkungan wisata yang lebih tertata, nyaman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi berbagai pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang pengunjung menyampaikan bahwa pengembangan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

"Dampak positifnya cukup banyak. Pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, karena banyak pengunjung yang datang dan membutuhkan layanan seperti kuliner, penginapan, hingga oleh-oleh. Kedua, membuka lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, memperkuat citra Aceh sebagai daerah yang religius dan kaya budaya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan pendukung, seperti kuliner, transportasi, penginapan, dan penjualan cendera mata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Selain memberikan dampak ekonomi, pengembangan wisata religi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Aktivitas wisata yang terus berkembang membutuhkan berbagai jenis layanan yang melibatkan tenaga kerja lokal. Kebutuhan akan pemandu wisata, petugas kebersihan, pelaku usaha kuliner, pedagang, serta penyedia jasa transportasi menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian,

pengembangan wisata religi tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja baru.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penguatan citra Aceh sebagai daerah yang religius dan kaya akan nilai budaya Islam. Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya menjadi simbol keagamaan masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi representasi identitas budaya daerah yang dikenal oleh wisatawan dari berbagai wilayah. Melalui pengelolaan yang baik, keberadaan masjid sebagai destinasi wisata religi mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan tradisi Islam Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wisata religi memiliki fungsi edukatif. Kehadiran wisatawan dari berbagai latar belakang memberikan kesempatan untuk memperkenalkan sejarah Masjid Raya Baiturrahman, nilai-nilai budaya Aceh, serta tradisi keislaman yang berkembang di masyarakat. Wisata religi tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga media pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman pengunjung terhadap warisan sejarah dan budaya Islam di Aceh. Fungsi edukatif ini menjadi salah satu karakteristik penting yang membedakan wisata religi dari bentuk wisata lainnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Abror dan Junari (2023) yang menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pengembangan wisata dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman telah memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan edukasi. Kolaborasi yang terbangun antar pemangku kepentingan tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat kontribusi wisata religi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pelestarian identitas budaya dan nilai-nilai keislaman di Aceh.

Tantangan dan Upaya Penguatan Kolaborasi

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman berjalan dengan baik, upaya penguatan kolaborasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata di masa mendatang. Dalam praktik *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi berbagai tantangan

yang mungkin muncul seiring perkembangan kebutuhan wisatawan dan perubahan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman. Kondisi tersebut didukung oleh hubungan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan, tingginya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai religius, serta dukungan pemerintah yang relatif konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah terbangun mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung pelaksanaan berbagai program pengembangan wisata religi.

Namun demikian, dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi perlu diikuti dengan upaya penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang selama ini berjalan masih banyak bergantung pada komunikasi informal dan hubungan kerja sama yang telah terbangun antar aktor. Kondisi tersebut memang efektif dalam mendukung pelaksanaan program, tetapi pada jangka panjang diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar kolaborasi dapat tetap berjalan secara konsisten meskipun terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan pada lembaga yang terlibat.

Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman sebagai destinasi wisata religi. Pengelola perlu terus menjaga keseimbangan antara fungsi masjid sebagai tempat ibadah dengan aktivitas wisata yang semakin berkembang. Pengaturan jadwal kunjungan, penyediaan informasi bagi wisatawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pengunjung menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tidak mengurangi kesakralan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah.

Upaya penguatan kolaborasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan forum komunikasi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan evaluasi program secara berkala, serta pengembangan program bersama yang melibatkan pemerintah, pengelola masjid, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, setiap pihak dapat memberikan masukan dan merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul sehingga kolaborasi tetap berjalan secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan Ningsih dan Yuza (2025) yang menegaskan bahwa keberlanjutan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata memerlukan dialog yang berkesinambungan, keterlibatan aktif para aktor, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman, penguatan komunikasi, koordinasi,

dan kelembagaan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman bukan terletak pada konflik antar pemangku kepentingan, melainkan pada upaya mempertahankan dan memperkuat kolaborasi yang telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komitmen bersama, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan *collaborative governance* dan menjaga posisi Masjid Raya Baiturrahman sebagai destinasi wisata religi unggulan di Kota Banda Aceh.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, pengelola masjid, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut tercermin dalam komunikasi dan koordinasi yang efektif, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya komitmen dan kepercayaan yang terbangun antar aktor dalam mendukung pengembangan wisata religi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan wisata, sementara pengelola masjid bertanggung jawab menjaga fungsi religius, fasilitas, dan kenyamanan kawasan masjid. Pelaku usaha berkontribusi dalam promosi dan pelayanan wisata, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan wisata religi. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman.

Penerapan *collaborative governance* juga memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat, terciptanya lapangan kerja, serta semakin kuatnya citra Aceh sebagai daerah yang religius dan kaya akan nilai budaya Islam. Selain berfungsi sebagai destinasi wisata, Masjid Raya Baiturrahman juga menjadi sarana edukasi yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan tradisi Islam Aceh kepada wisatawan.

Meskipun tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kolaborasi, penguatan komunikasi, koordinasi, dan kelembagaan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kerja sama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komitmen bersama, partisipasi aktif seluruh aktor, serta pengelolaan yang berorientasi pada keseimbangan antara

fungsi ibadah dan aktivitas wisata menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di masa mendatang.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan yang efektif dalam pengelolaan destinasi wisata religi yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata religi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan model kolaborasi yang berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan wisata religi di berbagai daerah.

Daftar Pustaka

- Abror, M. D., & Junari. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Administrative Reform*, 11(1), 77–90.
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177.
- Andriyanto, G. A. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. *Beleid*, 2(2), 138–154.
- Erwin, A. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat. *Public Policy and Management Inquiry*, 6(2). <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6797>
- Hidayat, M. W., Taufiq, A., & Rupiansieh. (2024). Collaborative governance dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 541–550. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3896>
- Imtiyaza, H., Astuti, R. S., & Kismartini. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 259–278.
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative governance dalam pembangunan inklusif wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171–178.
- Kanaya Avitadira, & Indrawati, N. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Lolkary, S. Y., & Laurens, S. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Perspektif collaborative governance. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14327–14333.
- Muallim, A. H., Juharni, & Suaib, M. R. (2024). Collaborative governance pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah: Studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengembangan pariwisata Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 83–88. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159>

- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The role of institutional design and enabling environment: Collaborative governance of a pilgrimage tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 75–90.
- Ningsih, F., & Yuza, A. F. (2025). Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Marina Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1–7.
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan wisata Kampung Bandar berbasis collaborative governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16011–16017. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8907>
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: UNS Press.